



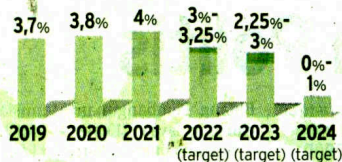
DIY Bebas Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

KONDISI KEMISKINAN DI DIY

Pemerintah Pusat dan daerah terus menekan angka kemiskinan lewat sejumlah program. Pemda DIY menargetkan pada dua tahun ke depan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di Bumi Mataram.

Kemiskinan ekstrem di Indonesia

Data BPS 2019-2021, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) 2022



- Selain kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga masih menjadi salah satu permasalahan pokok pembangunan di DIY.
- Badan Pusat Statistik melaporkan per Maret 2023, sebesar 1,12% penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin ekstrem.

JOGJA-Gubernur DIY Sri Sultan HB X menargetkan DIY bebas dari kemiskinan ekstrem pada 2025.

Yosef Leon & Annasa Rizki Kamalina
redaksi@jibinews.co

Pemberantasan kemiskinan ekstrem ini adalah tahapan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah, yakni *Terwujudnya Panca Mulia Masyarakat Jogja* melalui *Reformasi Kalurahan*, *Pemberdayaan Kawasan Selatan*, serta *Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*. "Untuk menurunkan kemiskinan, kami akan lebih fokus pada strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan," kata Sri

Sultan, Minggu (19/11).

Menujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027, terdapat beberapa permasalahan pokok pembangunan yang dihadapi yaitu kemiskinan, ketimpangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta potensi bencana. Rencana pembangunan 2025 diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut yang keberhasilannya tercermin pada pencapaian indikator-indikator keterwujudan Panca Mulia.

Selain kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga masih menjadi salah satu permasalahan pokok pembangunan di DIY. Peningkatan aksesibilitas di berbagai sektor, terutama di wilayah selatan, perlu terus dilakukan. Pusat-pusat ekonomi baru berbasis potensi di wilayah selatan perlu dikembangkan secara terpadu dan lintas sektor.

► Halaman 10



Grafik: Harian Jogja/Hengki Irawan | Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS DIY (OTU)

2025, DIY...

Sultan mengimbau agar para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY agar berpikir kreatif dan mengikuti perkembangan zaman yang mengarah pada industrialisasi. Aparat pemerintah harus membuat kebijakan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sultan mencontohkan agar tanah kas desa (TKD), Dana Keistimewaan, dan Lumbung Mataraman dimanfaatkan untuk menambah penghasilan masyarakat. Misalnya dengan menanam tanaman yang bernilai secara ekonomi. Tidak hanya menanam sayuran untuk dikonsumsi sendiri.

"APBD dasarnya kreativitas. Lumbung Mataram tanamannya punya potensi yang bisa mendapatkan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Nanti yang disewa dengan dana TKD memberikan nilai tambah, tidak hanya berubah dari menganggur terus menanam," ujarnya.

Sekda DIY, Beny Suharsono, menjelaskan berdasarkan catatan Pemda DIY angka kemiskinan tercatat sebanyak 11,04% yang menurut 0,45 dibandingkan dengan September 2023. Kemiskinan di DIY masih di atas rata-rata nasional yang di angka 9,36%. "Kami mendorong tahun 2024 ada formasi kebijakan Pemda DIY melalui kebijakan Gubernur yang akan menysar 800 lansia miskin. Mereka akan diberi tambahan pendapatan melalui belanja sembako. Program ini diharapkan akan menurunkan satu digit angka kemiskinan," ungkapnya.

Sebanyak 8.000 warga lansia di wilayah DIY akan mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan ekstrem berupa bahan kebutuhan pokok senilai Rp300.000 setiap bulan mulai 2024. Program yang didanai Dana Keistimewaan tersebut kurang lebih menelan anggaran Rp28,8 miliar.

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintersih, pada September 2023 lalu menjelaskan sasaran terbanyak bantuan tersebut berasal dari Gunungkidul, yakni 3.413 penerima yang tersebar di 18 kapanewon 144 kalurahan. Penerima terbanyak berikutnya

berdomisili di Sleman, yakni 2.400 lansia; disusul Bantul 1.186; Kota Jogja 560; dan Kulonprogo 441 penerima. 8.000 warga lansia yang mendapat bantuan itu tersebar di 78 kapanewon atau kemantren dan 438 kalurahan atau kelurahan.

Daya Beli

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan per Maret 2023, sebesar 1,12% penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin ekstrem. BPS mengkategorikan kemiskinan ekstrem menggunakan US\$1,9 per hari yang diukur melalui paritas daya beli atau *purchasing power parity* (PPP).

Standar tersebut setara dengan Rp351.957,4 per kapita per bulan pada Maret 2023. Pl. Kepala BPS Amalia Adiningsih menjelaskan bahwa Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, terdapat beberapa karakteristik dari rumah tangga yang tergolong miskin. "11,26 persen dari kepala rumah tangga miskin ekstrem tidak bisa membaca dan menulis," ungkapnya.

Selain itu, rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah 5,9 tahun, di mana 70% kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan rata-rata SD sederajat ke bawah.

BPS juga melaporkan bahwa 12,68% rumah keluarga yang tergolong miskin ekstrem memiliki lantai beralaskan tanah. "Sementara itu lapangan usaha kepala rumah tangga miskin ekstrem mayoritas adalah di lapangan usaha pertanian dengan proporsi sebesar 52 persen," ujarnya.

Di sisi lain, BPS juga mencatat bahwa sektor pertanian menjadi kontributor kedua terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2023, sektor pertanian menyumbang 13,57% terhadap PDB, setelah industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 18,75%. Amalia juga menyampaikan mengacu dalam Susenas Maret 2023, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem 1%-5% telah mencapai sebanyak 14 provinsi. Jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di

atas 5% masih ada dua provinsi, yaitu Papua memiliki angka kemiskinan ekstrem tertinggi sebesar 7,67%, sementara Papua Barat sebesar 6,43%.

Total 18 provinsi di Indonesia sudah mencatatkan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah 1% atau mendekati target 0%.

"Pada Maret 2023, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah satu persen sebanyak 18 provinsi atau sekitar 53 persen dari total provinsi di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data BPS dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud PMK), dari 18 provinsi tersebut, kemiskinan ekstrem paling rendah terdapat di Kalimantan Timur, yakni sebesar 0,10%. Sementara DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,57%. Di Timur Indonesia, Maluku Utara, juga telah tercatat memiliki masyarakat yang miskin ekstrem sebesar 0,67%. Adapun, dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023 tersebut, sebesar 1,12% penduduk Indonesia masih masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Pemakaian Data

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan penurunan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan tiga hal. *Pertama*, memaksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat. *Kedua*, memastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya.

Ketiga, mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial.

"Sebagai apresiasi, pemerintah memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada pemda yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Insentif ini kiranya dapat dimanfaatkan untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Wapres. (Bisnis.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005